



**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI  
TIGA UNSUR TERENDAH  
INDEKS PERSEPSI KORUPSI  
JANUARI - MARET 2026**

**PENGADILAN NEGERI SINABANG**

**KEPANITERAAN HUKUM**

**Jln. Tgk. Di Ujung No.406**

**Sinabang - Kab. Simeulue**

**2026**

## **LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI URAIAN TUGAS (JOB DESCRIPTIONS)**

### **A. Latar Belakang**

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi Pilot Project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

#### **A. Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

## **B. Hasil Monitoring dan Evaluasi serta Tindak Lanjut**

Berdasarkan hasil survei persepsi korupsi yang dilakukan, terdapat hasil survei 3 (tiga) terendah. Antara lain :

1. Indikator Manipulasi Peraturan dengan nilai 4,00;
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan dengan nilai 4,00;
3. Indikator Menjual Pengaruh dengan nilai 4,00 ;

Tindak lanjut dari ketiga unsur yang bernilai rendah diatas telah dilakukan dengan cara :

1. Indikator Manipulasi Peraturan  
Manipulasi Peraturan telah ditinjau lanjuti dengan cara meningkatkan Kerjasama dan harus bersemangat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat secara professional dan berintegritas.
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan  
Penyalahgunaan Jabatan telah ditindaklanjuti dengan cara Meawajibkan petugas untuk memakai tanda pengenal dan memasang banner pengaduan untuk mengantisipasi apabila terdapat pelanggaran penyalah gunaan jabatan.
3. Indikator Menjual Pengaruh  
Indikator Menjual Pengaruh telah ditindaklanjuti dengan cara meningkatkan pengawasan internal, melarang petugas bertemu langsung tanpa agenda resmi, dan memasang media informasi anti suap.

### C. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Sinabang diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Sinabang memiliki Indeks Persepsi Korupsi 100% atau masuk pada kategori “BERSIH DARI KORUPSI”.

Sinabang, 01 April 2026

Tanda tangan		
Panmud Hukum	Diperiksa Oleh :	Mengetahui
Nama lengkap & ttd	Nama Lengkap & ttd	Nama Lengkap & ttd
		
Roni, SH.	Anton Nursaleh Siregar, SH.	Riswandy, SH.,MH.